

DAFTAR PUSTAKA

1) Buku-buku

Abdul Manan, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).

Achmad Ichsan, *Hukum Perdata IB*, (Jakarta: Pembimbing Masa, 1969).

Adrian Sutedi, *Hukum Rumah Susun & Apartemen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).

Arief Hidayat, *Negara Hukum Pancasila (Suatu Model Ideal Dalam Penyelenggaraan Negara Hukum)*, tulisan yang dikompilasi dalam *Prosiding Kongres Pancasila IV: Strategi Pelembagaan Nilai-nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia*, Yogyakarta 31 Mei – 01 Juni 2012 (Yogyakarta : PSP UGM).

Arie S. Hutagalung, *Condominium dan Permasalahannya*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002).

Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajagrafindoPersada, 2006).

Bagir Manan, “*Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*”, (Jakarta: Ind-Hill. Co, 1992).

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006).

Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik: Peran Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan (Welfare) di*

- Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2007).
- Eddy Marek Leks, *Analisis Dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perumahan Rakyat*, (Pusat Perencanaan Pembangunan hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2013).
- Esping-Andersen *Three World of Welfare Capitalism* dalam Triwibowo dan Bahagijo, ed., *Mimpi Negara Kesejahteraan* (Jakarta: LP3ES, 2006).
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara (General Theory of Law and State)*, (Bandung: Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, 2006).
- Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, (Jakarta: Tintamas, 1973).
- Ifdhal Kasim, *Pemenuhan Hak-hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya Dalam Negara Hukum di Indonesia*, sebagai bagian kumpulan tulisan yang disusun oleh Bagir Manan, *Negara Hukum Yang Berkeadilan – Kumpulan Pemikiran Dalam Rangka Purnabakti*, (Bandung: Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2011).
- Jan Gijssels dan Mark Van Hoecke, *Wat is Rechtsteorie?*, diterjemahkan oleh B. Arif Sidharta, “*Apakah Teori Hukum Itu?*” *Dalam Seri Dasar-dasar Ilmu Hukum 3*, Penerbitan Tidak Berkala No. 3, (Bandung: Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2001).
- John Rawls, *A Theory of Justice – Teori Keadilan*, Cetakan III (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019)
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, (Jakarta: Kompas, 2010).
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Keadilan Sosial*, (Jakarta: Kompas, 2018).
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-undang*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- Jonker Sihombing, *Peran dan Aspek Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, (Bandung: PT Alumni, 2010).

- Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, *Perlindungan Hak Bermukim MBR dan Warga Miskin Perkotaan*, (Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, 2012)
- Lili Rasyidi, dan Ida Bagus Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Fikahati Aneska, 2012).
- Luthfi J. Kurniawan, Oman Sukmana, Abdussalam, Masduki, *Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*, (Malang: Intrans Publising, 2015).
- Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan – Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, (Jakarta: Kanisius, 2007).
- Maria Farida Indrati S., *“Ilmu Perundang-undangan (1)”*, (Yogyakarta: Kanisius, 2011).
- Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991).
- Moh. Kusnardi, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta : Sinar Bakti, 1987)
- Moh.Mahfud MD, *Prosiding Kongres Pancasila IV: Srategi Pelembagaan Nilai-nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia*, Yogyakarta 31 Mei – 01 Juni 2012 (Yogyakarta : PSP UGM).
- Mok Yew Fun, *The Concept of Condominium and Its Relevancy to Indonesia* (13 Desember 1978).
- Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam : Menyambut 73 Tahun Prof. Dr. H. Muhammad Tahir Azhary, S.H.Akademisi, Praktisi, Politisi*. (Jakarta: Kencana, 2015).
- Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali* (Bandung: Refika Aditama, 2007).
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006).

Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, (FHUI: Pascasarjana, 2003)

Rozikin Daman, *Hukum Tata Negara*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada).

Satjipto Rahardjo, *Rumah Susun Dan Persoalan-Persoalan Hukumnya: Suatu Orientasi*, dalam kumpulan tulisan yang disusun oleh Eko Budihardjo, “*Sejumlah Masalah Pemukiman Kota*” (Bandung: PT Alumni, 1998).

Setiawan, *Aneka masalah HUKUM Dan hukum Acara Oerdata*, Cet. 1 (Bandung: Alumni, 1992).

Shidarta dalam tulisannya *Pemetaan Aliran-Aliran Pemikiran Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2009).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Cet. III*, (Jakarta: Universitas Indonesia – UI Press, 2007).

Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cet. Keenam (Bandung: Alumni, 1995).

Sutan Remi Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993).

Tahir Azhary, *Negara Hukum Indonesia* (Jakarta : UI-Press, 1995).

Teguh Prasetyo, *Penelitian Hukum – Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, (Bandung: Nusa Media, 2019).

Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar, 1962).

Widodo Dwi Putro, “*Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*”, (Yogyakarta: Genta Publishig, 2011).

2) Peraturan Perundang-undangan

Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1988 Tentang Rumah Susun.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 Juncto Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 135 Tahun 2016 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan
Rakyat.

Instruksi Presiden No.7 & tahun 2017 Tentang Pengambilan, Pengawasan, Dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan Di Tingkat Kementerian Negara Dan Lembaga Pemerintahan.

Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 06/KPTS/BKP4N/1995 Tentang Pedoman
Pembuatan Akta Pendirian Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan
Penghuni Rumah Susun.

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 15/Permen/M/2007 Tentang Tata Laksana
Pembentukan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Sederhana Milik.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 23/Prt/M/2018 Tentang
Perhimpunan Pemilik Dan Penghuni Satuan Rumah Susun.

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 132 Tahun 2018 Tentang
Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik.

3) Putusan Pengadilan

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIII/2015 Tanggal 14 Desember 2016

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28 P/HUM/2019 Tanggal 23 Mei 2019.

4) Artikel, Tulisan, Jurnal, Internet, dan Sumber lainnya

Anugrah, <https://www.harianterbit.com/nasional/read/104993/Pengamat-Hukum-Property-Secara-Sistematis-Terlihat-Upaya-Oknum-Rebut-Pengelolaan-P3SRS>. Rabu, diakses pada 27 Maret 2019.

Arif, dalam artikel Teori Keadilan John Rawls, teratanggal 1 Desember 2008, dalam <https://staff.blog.ui.ac.id/arif51/2008/12/01/teori-keadilan-john-rawls/> diakses pada 16 Desember 2019

Berita PUPR, *Sambutan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mewakili Presiden RI Joko Widodo dalam Rapat Paripurna ke-19 DPR RI masa persidangan III tahun 2015-2016, di gedung DPR RI*, <https://www.pu.go.id/berita/view/9761/uu-tapera-disahkan-akses-pembiayaan-rumah-mbr-makin-terbuka>. 23 Oktober 2019.

<https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/investasi-properti-membaik-akhir-2019>, diakses pada 18 November 2019.

Gumanti Awaliyah/ Red: Indira Rezkisari, Sektor Properti Lesu, Pemerintah Diminta Ubah Regulasi <https://republika.co.id/berita/q0hol0328/sektor-properti-lesu-pemerintah-diminta-ubah-regulasi>, diakses pada 18 November 2019.

Havid Vebri, *Sektor gerakkan 174 bidang industry*, sebagaimana dikutip dari pernyataan Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Syarif Burhanuddin, pada tanggal 19 September 2015, artikel <https://industri.kontan.co.id/news/sektor-properti-gerakkan-174-bidang-industri>, diakses pada tanggal 18 November 2019.

Informasi dari Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI)

Nawir Arsyad Akbar, <http://jakarta.tribunnews.com/2018/04/21/kementerian-pupr-sosialisasikan-hunian-vertikal-ke-masyarakat-indonesia-sudah-menjadi-kebutuhan#gref>.
25 Maret 2019.

Pieter E Latumeten, *Reposisi Pemberian Kuasa Dalam Konsep “Volmacht Dan Lastgeving” Berdasarkan Cita Hukum Pancasila*, (Jurnal Hukum & Pembangunan 47 No. 1 (2017).

Presiden Joko Widodo, Pidato Presiden RI Pada Sidang Paripurna MPR RI Dalam Rangka Pelantikan Presiden Dan Wakil Presiden Terpilih Periode 2019-2024, Jakarta, 20 Oktober 2019, diakses dari <https://nasional.kompas.com/jeo/naskah-lengkap-pidato-presiden-joko-widodo-dalam-pelantikan-periode-2019-2024>, pada 18 Nov 19.

Rinaldi, *Permen Ini Menghambat Industri Properti*, diakses dari <http://www.rei.or.id/newrei/berita-permen-ini-menghambat-industri-properti.html>, pada tanggal 20 November 2019.

Sofie Widyana P., *Prinsip Hukum Pemberian Kuasa*, <https://www.hukumacaraperdata.com/surat-kuasa/prinsip-hukum-pemberian-kuasa/>, diakses pada tanggal 17 November 2019

Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_hukum, 23 Oktober 2019.